



**PEMERINTAH  
KABUPATEN BULELENG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PERTANIAN**

Jalan Ahmad Yani No.99 Singaraja

Telp /Fax. 0362 - 25090

email: [distan@bulelengkab.go.id](mailto:distan@bulelengkab.go.id), [distanbuleleng@gmail.com](mailto:distanbuleleng@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara NugrahaNya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, secara substansi merupakan sarana perencanaan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 26 Agustus 2025



Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng

**Gede Melandrat,SP**

NIP. 197207121998031010

## DAFTAR ISI

<b><i>Kata Pengantar</i></b>	.....	<b><i>i</i></b>
<b><i>Daftar Isi</i></b>	.....	<b><i>ii</i></b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang	.....	1
1.2.Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	.....	1
1.3.Tujuan RKT	.....	2
<b>BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN</b>	.....	<b>4</b>
2.1.Sasaran/Capaian Program	.....	4
2.2.Indikator dan Target Kinerja	.....	5
<b>BAB III. PENUTUP</b>	.....	<b>6</b>
<b><i>Lampiran</i></b>	.....	<b><i>iii</i></b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

### 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang Pertanian;
- pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian;
- pelaksanaan administrasi dinas Pertanian;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Struktur Organisasi

Secara organisasi / struktural Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Prasarana dan Sarana
4. Bidang Tanaman Pangan
5. Bidang Hortikultura
6. Bidang Perkebunan
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
8. Bidang Penyuluhan Pertanian

### 1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

## BAB II

### RENCANA KINERJA TAHUNAN

#### 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1(satu) sampai dengan 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran-sasaran dengan indikator-indikatornya.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dengan dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng 2023-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi ke-2 Bupati terpilih, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam formula tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Buleleng 2023-2026 sebagai berikut:

Misi : 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah

Tujuan : 1. Berkembangnya produk unggulan daerah

Sasaran : Meningkatnya nilai produk pertanian

Sesuai dengan Tujuan pada masing-masing Misi dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 berdasarkan urusan dan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU, DAYA SAING DAN PEMASARAN KOMODITAS PERTANIAN”**

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai Tupoksi Dinas Pertanian

serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk periode 2023-2026, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju
2. Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri
3. Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern

## 2.2. Indikator dan Target Kinerja

Dalam melaksanakan dan mewujudkan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng pada tahun 2025, maka telah disusun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pada tahun 2025. Rancangan target sasaran 2025 telah disusun dalam 3 indikator kinerja utama (IKU) yang didukung dengan 6 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan

Adapun IKU Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	Persentase peningkatan produksi pertanian (%)
2	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri	Persentase Kelembagaan Petani dan pelaku usaha yang Mandiri (%)
3	Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern	Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi %

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2025 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan (Lampiran Rencana Kinerja Tahunan)

### BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pada tahun 2025. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan pejabat penerima amanah dan pada akhir tahun 2025 dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja pejabat penerima amanah.

Dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ini maka penerima amanah diharapkan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan kepada masyarakat.

Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan sebuah langkah yang sistematis agar pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel dan berdaya guna untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Singaraja, 26 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng



**Gede Melandrat.SP**  
NIP. 197207121998031010

# LAMPIRAN

---

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan		
Uraian	Indikator Kinerja			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output				
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9		
1.	Terwujudnya produksi pertanian yang berdaya saing	1.	Meningkatnya tatakelola administrasi perkantoran	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai perundangan	116,914,092.88	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62,942,751.00	
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48,798,940.88	
									Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2,950,000.00	
									Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2,222,401.00	
							23,489,605,952.38		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	23,358,615,872.00	
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5,200,000.00	
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32,110,708.38	
									Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	93,679,372.00	
							952,643,925.00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset BMD	952,643,925.00	
							3,542,230.00		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	3,542,230.00	
							135,242,626.36		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	12,210,000.00	
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	123,032,626.36	
							625,050,066.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang kegiatan administrasi umum perangkat daerah	9,679,200.00	
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	389,283,616.00	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	132,518,000.00	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	-Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	59,389,950.00	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34,179,300.00	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang Pengadaan BMD	4,440,000.00	Pengadaan Mebel	-Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4,440,000.00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang urusan pemerintah daerah	775,151,589.70	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32,039,857.00	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	237,504,717.00	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	279,130,342.42	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	226,476,673.28	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	579,705,240.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	395,369,480.00	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	184,335,760.00	
	2.	Produktivitas Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan, Komoditas Padi (KW/Ha)	60.84 (KW/Ha)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	324,589,062.36	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	169,911,272.00	
								Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	154,677,790.36	
		Produktivitas Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan, Komoditas Jagung (KW/Ha)	45.87 (KW/Ha)		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	407,005,138.36	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	92,929,538.00	

							Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	314,075,600.36	
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	972,034,347.72	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	972,034,347.72	
	3. Persentase peningkatan produksi Pertanian Unggulan Daerah (%)	1,86 (KW/Ha)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	103,483,750.00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	33,639,820.00	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	69,843,930.00	
				Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	124,670,000.00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan Usaha Tani	Jumlah alan usaha tani usaha tani yang direhabilitasi	45,500,000.00	
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	79,170,000.00	
				Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	651,813,768.00	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Daerah Kabupaten/kota	651,813,768.00	
				Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit ternak mencapai target	114,405,534.08	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	114,405,534.08	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	195,252,630.00	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	26,520,000.00	
							Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	48,378,164.00	
							Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	114,134,466.00	
							Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	6,220,000.00	

			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan yang melakukan intensifikasi pengelolaan pertanian dan peternakan %	1,698,910,035.16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	355,654,525.00	
							Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	97,543,932.00	
							Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	784,378,066.16	
							Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	39,533,512.00	
							Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyediaan dan peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	421,800,000.00	

Singaraja, 26 Agustus 2025

Kepala Dinas Pertanian Kab. Buleleng



*Melandy*  
GEDE MELANDRAT, SP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19720712 199803 1 010